

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kemiskinan di Indonesia merupakan salah satu masalah kompleks yang seakan menjadi penyebab munculnya masalah-masalah lain. Tidak dapat dipungkiri bahwa Indonesia merupakan Negara yang memiliki sumber daya alam yang berlimpah dan sumber daya manusia yang cukup memadai. Namun dengan ketersediaan sumber daya yang ada masih banyak masyarakat Indonesia yang berada pada garis kemiskinan. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) tingkat kemiskinan pada bulan Maret 2018, jumlah penduduk miskin di Indonesia mencapai 25,95 juta orang (9,82 %), berkurang sebesar 633,2 ribu orang dibandingkan dengan kondisi di bulan September 2017 yang sebesar 26,58 juta orang (10,12 %)¹. Adanya penurunan tingkat kemiskinan tersebut masih dinilai kurang signifikan dan masih menunjukkan bahwa permasalahan kemiskinan masih tetap ada.

Berkaitan dengan tingginya tingkat kemiskinan ada enam factor penyebab kemiskinan, yaitu : 1) Pendidikan yang rendah. Tingkat pendidikan yang rendah menyebabkan seseorang kurang mempunyai keterampilan tertentu yang diperlukan dalam kehidupannya. Keterbatasan pendidikan atau keterampilan yang dimiliki seseorang menyebabkan keterbatasan kemampuan seseorang untuk masuk dalam

¹ <https://www.bps.go.id>, diakses 10 Februari 2020, Jam 19.30 WIB

dunia kerja. 2) Malas bekerja. Adanya sikap malas (bersikap pasif atau bersandar pada nasib) menyebabkan seseorang bersikap acuh tak acuh sehingga tidak memiliki gairah untuk bekerja. 3) Keterbatasan sumber daya alam. Suatu masyarakat akan dilanda kemiskinan apabila sumber alamnya tidak lagi memberikan keuntungan bagi kehidupan mereka. Hal ini sering dikatakan masyarakat itu miskin karena sumber daya alamnya miskin. 4) Terbatasnya lapangan kerja. Keterbatasan lapangan kerja akan membawa konsekuensi kemiskinan bagi masyarakat. Secara ideal seseorang harus mampu menciptakan lapangan kerja baru sedangkan secara factual hal tersebut sangat kecil kemungkinannya bagi masyarakat miskin karena keterbatasan modal dan keterampilan. 5) Keterbatasan modal. Seseorang miskin sebab mereka tidak mempunyai modal untuk melengkapi alat maupun bahan dalam rangka menerapkan keterampilan yang mereka miliki dengan suatu tujuan untuk memperoleh penghasilan. 6) Beban keluarga. Seseorang yang mempunyai beban keluarga banyak apabila tidak diimbangi dengan usaha peningkatan pendapatan akan menimbulkan kemiskinan karena semakin banyak anggota keluarga akan semakin meningkat tuntutan atau beban untuk hidup yang harus dipenuhi.

Kemiskinan terjadi bukan hanya karena ketidakmauan individu untuk bekerja melainkan adanya ketidakmampuan system dan struktur social dalam menyediakan kesempatan yang memungkinkan mereka untuk bekerja. Salah satu contoh permasalahan yang ada di dalam individu yaitu rendahnya tingkat pendidikan yang menyebabkan seseorang individu kurang memiliki keterampilan tertentu. Dengan adanya keterbatasan tersebut menyebabkan kesulitan dalam

mencari lapangan pekerjaan sehingga masyarakat perlu untuk diberdayakan sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 15 tahun 2010 bahwa kemiskinan merupakan permasalahan bangsa yang memerlukan langkah-langkah penanganan dan pendekatan yang sistematis, terpadu, menyeluruh dalam rangka mengurangi beban serta memenuhi hak dasar warga negara secara layak melalui pembangunan inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan guna mewujudkan kehidupan yang bermartabat.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintahan daerah diberikan otonomi yang luas untuk mengurus dan mengatur berbagai kepentingan daerah. Adanya desentralisasi ini menjadikan pemerintah daerah sadar akan pentingnya kemandirian daerah yang bertumpu pada pemberdayaan potensi lokal. Pemerintah daerah memiliki wewenang dan tanggung jawab penuh dalam mengelola potensi sumber daya yang dimiliki oleh daerahnya secara optimal, sehingga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi lokal dan menggerakkan pembangunan daerah. Oleh sebab itu pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk menanggulangi kemiskinan dan mensejahterakan masyarakatnya.

Salah satu cara guna menanggulangi masalah kemiskinan adalah dengan adanya pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat merupakan proses pembangunan dimana masyarakat berinisiatif untuk memulai proses kegiatan social guna memperbaiki situasi dan kondisi diri sendiri². Suatu usaha hanya berhasil

² James A. C dan Jerry W.R, *Community Development In Perspective*, (Jr Ames: Iowa State University Press. 1989).

dinilai sebagai pemberdayaan masyarakat apabila kelompok komunitas atau masyarakat tersebut menjadi agen pembangunan atau dikenal juga sebagai subjek. Subjek disini merupakan motor penggerak dan bukan penerima manfaat atau objek saja. Pemberdayaan masyarakat dapat dilakukan dengan bantuan pemerintah ataupun dilakukan secara mandiri oleh masyarakat atau perorangan.

Kampung Lele merupakan julukan untuk sebuah desa yang terletak di Kecamatan Sawit Kabupaten Boyolali, desa tersebut bernama Desa Tegalrejo. Dijuluki Kampung Lele karena mayoritas penduduk setempat merupakan pembudidaya ikan lele. Awal mula pada tahun 1993 seorang petani setempat membuat kolam ikan lele di halaman rumahnya. Kemudian yang dilakukan oleh petani tersebut diikuti oleh beberapa warga lainnya yang membuat kolam lele di lahan persawahan. Seiring dengan berjalannya waktu ternyata usaha budidaya ikan lele tersebut berkembang semakin pesat dan satu persatu masyarakat Desa Tegalrejo beralih profesi dari bercocok tanam menjadi budidaya ikan, karena menurut masyarakat setempat pendapatan dari hasil bercocok tanam dinilai kurang mencukupi dibandingkan dengan budidaya ikan. Selain budidaya ikan lele masyarakat Desa Tegalrejo juga mengolah hasil panen menjadi berbagai macam produk olahan seperti abon lele, keripik daging lele, keripik sirip lele dan lain sebagainya. Berdasarkan kegiatan tersebut pendapatan masyarakat dan desa meningkat, sehingga mampu membiayai kebutuhan secara mandiri.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dalam penelitian ini peneliti akan mengulas lebih mendalam mengenai pemberdayaan masyarakat di Kampung Lele. Judul penelitian yang akan diangkat oleh peneliti adalah ***“Pemberdayaan***

Masyarakat Berbasis Budaya Dalam Mengembangkan Kampung Lele Di Desa Tegalrejo Kecamatan Sawit Kabupaten Boyolali”

1.2 Rumusan Masalah

Adapun permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana mekanisme pelaksanaan pemberdayaan masyarakat berbasis budaya di Desa Tegalrejo melalui pengembangan Kampung Lele?
2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam melakukan pemberdayaan masyarakat berbasis budaya di Desa Tegalrejo melalui Kampung Lele?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mendeskripsikan mekanisme pelaksanaan pemberdayaan masyarakat berbasis budaya di Desa Tegalrejo melalui pengembangan Kampung Lele.
2. Untuk menganalisa faktor yang mendukung dan menghambat dalam melakukan pemberdayaan masyarakat berbasis budaya di Desa Tegalrejo melalui Kampung Lele agar dijadikan sebagai bahan evaluasi terhadap pelaksanaan pemberdayaan yang akan datang, sehingga faktor-faktor yang menjadi kendala dan pendukung dapat dijadikan sebagai tolak ukur dimasa mendatang.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini secara teoritis merupakan sumbangan penting dalam menambah wawasan, khususnya dalam pemberdayaan masyarakat dimasa yang akan datang. Konsep hasil penelitian diharapkan dapat memberikan masukan pengetahuan dan perkembangan ilmu pemerintahan di bidang tata kelola pemerintahan dalam sektor informal, terutama yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat. Penelitian ini secara teoritis menambah suatu konsep yang dapat dijadikan sebagai bahan-bahan penelitian lebih lanjut, khususnya pemberdayaan masyarakat di Desa Tegalrejo. Penelitian ini juga diharapkan mampu memperkuat teori-teori tentang pemerdayaan masyarakat sebagai kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah.

1.4.2 Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dengan terjun langsung dan memberikan pengalaman yang mempermudah kemampuan dan ketrampilan peneliti. Dengan terjun langsung di lokasi penelitian, peneliti dapat menambah wawasan mereka serta mendapatkan pengetahuan dan pengalaman dari setiap tahapan penelitian yang dilakukan di lapangan dalam rangka memperoleh data.

b. Bagi Masyarakat

Dengan adanya penelitian diatas diharapkan dapat menambah pengetahuan dan informasi bagi masyarakat dan pada umumnya untuk mengetahui program-program yang telah dilakukan oleh masyarakat desa setempat maupun Pemerintah Daerah sebagai upaya mensejahterakan masyarakat, serta untuk mengetahui upaya-upaya dalam mendukung program Pemberdayaan sebagai bahan pertimbangan bagi masyarakat dikemudian hari.

c. Bagi Pemerintah Daerah

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan bagi badan pelaksana dan instansi terkait dengan pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Boyolali sebagai upaya dari tata kelola pemerintahan pada sektor informal untuk kemudian dilakukan evaluasi dan perbaikan dalam pelaksanaan kebijakan selanjutnya atau sebagai dasar dalam pembuatan kebijakan terkait dengan pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Boyolali. Hasil dari penelitian ini dapat dijadikan sebagai indicator kinerja Pemerintah Kabupaten Boyolali dalam menangani program pemberdayaan masyarakat, serta dapat digunakan sebagai tolak ukur untuk meningkatkan program-program pemberdayaan dimasa yang akan datang.

1.5 Landasan Teori

1.5.1 Teori Pemberdayaan

Secara etimologis pemberdayaan berasal dari kata dasar “daya” yang berarti kekuatan atau kemampuan. Bertolak dari pengertian tersebut maka pemberdayaan dapat dimaknai sebagai suatu proses menuju berdaya atau proses untuk memperoleh daya/kekuatan/kemampuan dari pihak yang memiliki daya kepada pihak yang kurang atau belum berdaya.

Pengertian “proses” menunjukkan pada serangkaian tindakan atau langkah-langkah yang dilakukan secara kronologis sistematis yang mencerminkan upaya untuk mengubah kondisi masyarakat yang lemah, baik secara *knowledge*, attitude maupun *practice* (KAP) menuju pada penguasaan pengetahuan, sikap-perilaku sadar dan kecakapan-keterampilan yang baik.

Makna “memperoleh” daya/kekuatan/kemampuan menunjuk pada sumber inisiatif dalam rangka mendapatkan atau meningkatkan daya, kekuatan atau kemampuan sehingga memiliki keberdayaan. Kata “memperoleh” mengindikasikan bahwa yang menjadi sumber inisiatif untuk berdaya berasal dari masyarakat itu sendiri. Dengan demikian masyarakat yang mencari, mengusahakan, melakukan, menciptakan situasi atau meminta pada pihak lain untuk memberikan daya/kekuatan/kemampuan. Iklim tersebut dapat tercipta jika masyarakat tersebut menyadari ketidakberdayaan dan sekaligus disertai dengan kesadaran akan perlunya memperoleh daya/kemampuan/kekuatan.

Makna kata “pemberian” menunjukkan bahwa sumber inisiatif bukan dari masyarakat. Inisiatif untuk mengalihkan daya/kemampuan/kekuatan adalah pihak-pihak lain yang memiliki kekuatan dan kemampuan, misalnya pemerintah atau agen-agen lainnya. Senada dengan pengertian ini Prijono dan Pranarka menyatakan bahwa pemberdayaan mengandung dua arti. Pengertian yang pertama adalah *to give or authority*, pengertian kedua *to give ability to or enable*. Pemaknaan pengertian pertama meliputi memberikan kekuasaan, mengalihkan kekuatan atau mendelegasikan otoritas kepada pihak yang kurang atau belum berdaya. Di sisi lain pemaknaan pengertian kedua adalah memberikan kemampuan atau keberdayaan serta memberikan peluang kepada pihak lain untuk melakukan sesuatu³.

Berkenaan dengan pemaknaan konsep pemberdayaan masyarakat, Winarni mengungkapkan bahwa inti dari pemberdayaan adalah meliputi tiga hal yaitu pengembangan (*enabling*), memperkuat potensi atau daya (*empowering*) dan terciptanya kemandirian (*independence*). Pada hakikatnya pemberdayaan merupakan penciptaan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang (*enabling*). Logika ini didasarkan pada asumsi bahwa tidak ada masyarakat yang sama sekali tanpa memiliki daya. Setiap masyarakat pasti memiliki daya, akan tetapi kadang-kadang mereka tidak menyadari atau daya tersebut masih belum diketahui secara eksplisit. Oleh karena itu daya harus digali dan kemudian dikembangkan. Jika asumsi ini berkembang maka pemberdayaan adalah upaya untuk membangun daya dengan cara mendorong, memotivasi dan

³ Onny S Prijono dan A.M.W Pranarka, “*Pemberdayaan: Konsep, Kebijakan dan Implementasi*”, (Jakarta: Center for Strategic an International Studies, 1996).

membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki serta berupaya untuk mengembangkannya. Disamping itu hendaknya pemberdayaan jangan menjebak masyarakat alam perangkap ketergantungan (*depandancy*), pemberdayaan sebaliknya harus mengantarkan pada proses kemandirian.

Akar pemahaman yang diperoleh dalam gagasan ini adalah :

1. Daya dipahami sebagai suatu kemampuan yang seharusnya dimiliki oleh masyarakat, supaya mereka dapat melakukan sesuatu (pembangunan) secara mandiri.
2. Pemberdayaan merupakan suatu proses bertahap yang harus dilakukan dalam rangka memperoleh serta meningkatkan daya sehingga masyarakat mampu mandiri⁴.

Pemberdayaan memiliki makna membangkitkan sumber daya, kesempatan, pengetahuan dan keterampilan masyarakat untuk meningkatkan kapasitas dalam menentukan masa depan mereka. Konsep utama yang terkandung dalam pemberdayaan adalah bagaimana memberikan kesempatan yang luas bagi masyarakat untuk menentukan sendiri arah kehidupan dalam komunitasnya.

Pemberdayaan memberikan tekanan pada otonom pengambilan keputusan dari suatu kelompok masyarakat. Penerapan aspek demokrasi dan partisipasi dengan titik focus pada lokalitas akan menjadi landasan bagi upaya penguatan

⁴ Tri Winarni, "*Memahami Pemberdayaan Masyarakat Desa Partisipatif dalam Orientasi Pembangunan Masyarakat Desa Menyongsong Abad 21*", (Yogyakarta: Adita Media, 1998), halaman 75-76.

potensi lokal. Pada tingkat ini pemberdayaan masyarakat juga difokuskan pada penguatan individu anggota masyarakat beserta pranata-pranatanya. Pendekatan utama dalam konsep pemberdayaan ini adalah menempatkan masyarakat tidak sekedar sebagai objek melainkan juga sebagai subyek.

Konteks pemberdayaan sebenarnya terkandung unsur partisipasi yaitu bagaimana masyarakat dilibatkan dalam proses pembangunan dan hak untuk menikmati hasil pembangunan. Pemberdayaan mementingkan adanya pengakuan subyek akan kemampuan atau daya (power) yang dimiliki objek. Secara garis besar, proses ini melihat pentingnya mengalihfungsikan individu yang tadinya obyek menjadi subjek⁵.

1.5.1.1 Pendekatan Pemberdayaan

Pendekatan pemberdayaan dapat diformulasikan atas dasar landasan filosofis dan prinsip-prinsip pemberdayaan yaitu pendekatan partisipatif, pendekatan pemberdayaan dan pendekatan pembangunan berkelanjutan⁶. Pendekatan partisipatif selalu menempatkan masyarakat sebagai titik pusat pelaksanaan pemberdayaan. Pemberdayaan juga bertujuan untuk memecahkan masalah yang dialami masyarakat, bukan untuk mencapai tujuan tertentu yang ditetapkan orang luar. Pilihan kegiatan, metode, teknik, maupun ukuran keberhasilan didasarkan pada masyarakat.

⁵ Suparjan dan Hempri Suyatno, "*Pengembangan Masyarakat dari pembangunan sampai pemberdayaan*", (Yogyakarta: Aditya Media, 2003), halaman 43-44.

⁶ *Ibid.*, halaman 161.

Dalam pendekatan kesejahteraan segala bentuk kegiatan, sumberdaya, teknologi yang akan digunakan dan tokoh-tokoh yang akan terlibat harus memberikan manfaat terhadap perbaikan mutu hidup atau kesejahteraan masyarakat sebagai penerima manfaat. Sedangkan pendekatan pembangunan berkelanjutan menekankan pada kegiatan yang terjamin keberlanjutannya. Oleh karena itu tidak boleh menciptakan ketergantungan. Masyarakat harus dipersiapkan agar mandiri untuk melanjutkan kegiatan pemberdayaan tersebut.

Pemberdayaan masyarakat juga dapat dilakukan terhadap sekelompok penerima manfaat. Pemberdayaan melalui pendekatan kelompok dinilai lebih mudah dilakukan daripada pendekatan pemberdayaan individu⁷. Masyarakat miskin dinilai lebih sulit memecahkan masalah-masalahnya apabila dilakukan secara sendiri-sendiri. Oleh karena itu, pemberdayaan melalui pendekatan kelompok menggunakan kelompok sebagai media intervensi, pendidikan, pelatihan serta strategi dalam meningkatkan pengetahuan, kesadaran, keterampilan dan sikap individu. Pendekatan kelompok dinilai lebih efisien daripada pendekatan perseorangan jika dilihat dari penggunaan sumber dayanya. Karena pendekatan yang dilakukan melalui pendekatan perseorangan akan menghabiskan sumber daya yang cukup besar dan dinilai kurang efisien.

⁷ Totok Mardikanto dan Poerwoko Soebianto, *"Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik"*, (Bandung: Alfabeta, 2013), halaman 163.

1.5.1.2 Lingkup Kegiatan Pemberdayaan

Pemberdayaan memiliki empat lingkup kegiatan yaitu bina manusia, bina usaha, bina lingkungan dan bina kelembagaan⁸. Pemberdayaan bina manusia merupakan upaya yang pertama dan utama dalam pemberdayaan masyarakat. Hal ini didasarkan pada pemahaman bahwa tujuan pembangunan adalah untuk memperbaiki mutu hidup atau kesejahteraan manusia. Termasuk dalam upaya ini manusia adalah pengembangan kapasitas individu, kapasitas kelembagaan dan system atau jejaring (interaksi antar entitas).

Pemberdayaan bina usaha menjadi salah satu upaya penting dalam pemberdayaan, sebab tanpa adanya bina usaha maka kegiatan pemberdayaan bina manusia akan memberikan dampak atau manfaat bagi perbaikan ekonomi. Kegiatan pemberdayaan yang hanya berhenti pada bina manusia cenderung kurang diminati oleh masyarakat.

Dengan adanya pemberdayaan bina lingkungan diharapkan mampu menumbuhkan kemauan dan kemampuan masyarakat untuk dapat turut serta menjaga lingkungan secara berkelanjutan. Isu-isu yang berkenaan dengan lingkungan dinilai sangat penting sejak dikembangkannya paham pembangunan berkelanjutan. Lingkungan yang dimaksud diatas tidak hanya sebatas pada lingkungan fisik saja, tetapi juga termasuk lingkungan social seperti kesehatan, pendidikan maupun sarana dan prasarana umum.

⁸ *Ibid.*, halaman 114.

Efektivitas kelembagaan akan sangat berpengaruh terhadap keberhasilan bina manusia, bina usaha dan bina lingkungan. Oleh karena itu, pemberdayaan dalam bina kelembagaan dilakukan melalui pembaharuan nilai-nilai seperti kerja keras, keterbukaan, hemat dan kebertanggungjawaban dalam institusi-institusi social.

1.5.1.3 Prinsip-Prinsip Pemberdayaan

Mengacu pada pengertian tentang pemberdayaan, maka terdapat beberapa prinsip pemberdayaan yang dikemukakan oleh Oos Anwas sebagai berikut :⁹

1. Pemberdayaan harus sebanyak mungkin melibatkan masyarakat untuk mengerjakan sesuatu. Pemberdayaan adalah proses pembelajaran. Kewenangan masyarakat dalam pengambilan akan membantu masyarakat belajar untuk menentukan hidupnya sendiri. Pengalaman-pengalaman yang didapat diharapkan akan menumbuhkan jiwa kemandirian dalam diri masing-masing individu.
2. Pemberdayaan didasarkan pada kebutuhan, masalah dan potensi masyarakat. Setiap masyarakat juga memiliki kebutuhan, permasalahan dan potensi yang berbeda-beda, dengan demikian pola pelaksanaan pembangunan masyarakat yang cocok dan berhasil diterapkan dalam masyarakat tertentu belum tentu berhasil dalam

⁹ Anwas. Oos M, "*Pemberdayaan Masyarakat di Era Global*", (Bandung: Alfabeta, 2003), halaman 58.

masyarakat lain. Masyarakat dianggap lebih mengetahui apa yang dibutuhkan sehingga akan membuat program yang diberikan lebih tepat sasaran. Keterlibatan masyarakat akan membuat masyarakat merasa ikut memiliki, sehingga merasa ikut bertanggungjawab akan keberhasilannya.

3. Pemberdayaan harus memerhatikan keragaman budaya local serta mampu merubah atau menumbuhkan kembali nilai-nilai, budaya dan kearifan local. Pemberdayaan diharapkan mampu memberikan perubahan tidak hanya bagi diri individu tetapi juga lingkungan bahkan budaya suatu masyarakat. Setiap kegiatan pemberdayaan yang mengakibatkan perubahan budaya harus dilaksanakan dengan bijak dan hati-hati agar perubahan yang terjadi tidak menimbulkan kejutan-kejutan budaya.
4. Kegiatan pendampingan atau pembinaan harus dilakukan secara bijak, bertahap dan menyeluruh. Pendamping atau penyuluh harus benar-benar memahami fungsi dan tugasnya sebagai pendamping masyarakat. Penyuluh tidak hanya melakukan kegiatan-kegiatan procedural semata, tetapi lebih dari itu. Penyuluh harus mampu mengembangkan kepemimpinannya sehingga akan muncul pemimpin-pemimpin local yang mampu menggerakkan kegiatan pemberdayaan selanjutnya.
5. Kemampuan untuk mandiri dan tidak tergantung pada kelompok tertentu. Keswadayaan yang diperoleh dari kegiatan-kegiatan

pemberdayaan membuat masyarakat mampu merumuskan pelaksanaan kegiatan tanpa menunggu dorongan dari pihak lain.

6. Partisipatif dengan melibatkan semua stakeholders mulai dari proses pengambilan keputusan hingga evaluasi kinerja dan pemanfaatan output yang berhasil dicapai. Stakeholders ditempatkan pada posisi yang sederajat sehingga tidak ada satupun yang lebih mendominasi.
7. Demokratis atau memberikan hak kepada semua pihak untuk mengemukakan pendapat tanpa adanya unsur paksaan.

1.5.1.4 Proses Pemberdayaan

Menurut Wrihatnolo pemberdayaan adalah sebuah proses menjadi, bukan proses instan. Sebagai proses pemberdayaan memiliki tiga tahapan, yaitu :¹⁰

1. Tahap pertama adalah *penyadaran*. Pada tahap ini target yang hendak diberdayakan diberi pencerahan dalam bentuk pemberian penyadaran bahwa mereka punya hak untuk mempunyai sesuatu. Misalnya, target adalah kelompok masyarakat miskin, kepada mereka akan diberikan pemahaman bahwa mereka dapat menjadi berada dan itu dapat dilakukan jika mereka mempunyai kapasitas untuk keluar dari kemiskinannya. Program-program yang dapat dilakukan pada tahap ini misalnya, memberikan pengetahuan yang bersifat kognisi dan belief. Prinsip dasarnya adalah membuat target

¹⁰ Randy Wrihatnolo dan Riant Nugroho Dwidjowito, “*Manajemen Pemberdayaan: Sebuah Pengantar dan Panduan Untuk Pemberdayaan Masyarakat*”, (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2007), halaman 3-6.

mengerti bahwa mereka perlu membangun (diberdayakan) dan proses pemberdayaan itu dimulai dari dalam diri mereka.

2. Tahap kedua adalah *pengkapasitasan*. Inilah yang sering kita sebut *capacity building* atau dalam Bahasa yang lebih sederhana memampukan. Untuk diberikan daya atau kuasa, yang bersangkutan harus mampu terlebih dahulu. Misalnya, sebelum memberikan otonomi daerah seharusnya daerah-daerah yang diotonomkan diberi program-program pemampuan atau *capacity building* untuk membuat mereka cakap dalam mengelola otonom yang diberikan. Proses *capacity building* terdiri atas tiga jenis yaitu manusia, organisasi dan system nilai.
3. Tahap ketiga adalah *pemberian* daya itu sendiri atau *empowerment*. Pada tahap ini kepada target diberikan daya, kekuasaan, otoritas atau peluang. Pemberian ini sesuai dengan kualitas kecakapan yang telah dimiliki, prosedur pada tahap ketiga ini cukup sederhana, namun kita seringkali tidak cakap menjalankannya karena mengabaikan bahwa dalam kesederhanaan pun ada ukuran. Pokok gagasannya adalah bahwa proses pemberian daya atau kekuasaan diberikan sesuai dengan kecakapan penerima.

1.5.1.5 Tingkat Keberdayaan Masyarakat

Istilah keberdayaan dalam konteks masyarakat adalah kemampuan individu yang bersenyawa dengan individu-individu lainnya dalam masyarakat

untuk membangun keberdayaan masyarakat yang bersangkutan¹¹. Secara bertingkat, keberdayaan masyarakat menurut Susiladiharti yang dikutip dalam bukunya Abu Huraerah adalah :¹²

1. Terpenuhinya kebutuhan dasar.
2. Penguasaan dan akses terhadap berbagai system dan sumber yang diperlukan
3. Dimilikinya kesadaran penuh akan berbagai potensi, kekuatan dan kelemahan diri serta lingkungannya.
4. Kemampuan berpartisipasi secara aktif dalam berbagai kegiatan yang bermanfaat bagi lingkungan yang lebih luas.
5. Kemampuan untuk mengendalikan diri dan lingkungannya. Tingkatan kelima ini dapat dilihat dari keikutsertaan dan dinamika masyarakat dalam mengevaluasi dan mengendalikan berbagai program dan kebijakan institusi dan pemerintah.

Keberhasilan pemberdayaan masyarakat dapat dilihat dari keberdayaan mereka menyangkut kemampuan ekonomi, kemampuan mengakses manfaat kesejahteraan dan kemampuan kultural politis. ketiga aspek tersebut dikaitkan dengan empat dimensi kekuasaan yaitu kekuasaan di dalam (*power within*),

¹¹ Anwar, “*Manajemen Pemberdayaan Perempuan*”, (Bandung: Alfabeta, 2007), halaman 1.

¹² Abu Huraerah, “*Pengorganisasian dan Pemberdayaan Masyarakat*”, (Bandung: Humaniora, 2008), halaman 90.

kekuasaan untuk (*power to*), kekuasaan atas (*power over*) dan kekuasaan dengan (*power with*)¹³.

1.6 Operasionalisasi Konsep

Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat melalui Pengembangan Kampung Lele dilakukan dalam bentuk pemberdayaan bina manusia, bina kelembagaan, bina usaha dan bina lingkungan. Pemberdayaan bina manusia dilakukan melalui peningkatan pemahaman masyarakat Desa Tegalrejo tentang budidaya ikan lele kepada seluruh lapisan masyarakat desa, serta peran aktif dari berbagai stakeholders dalam perkembangannya. Kegiatan bina kelembagaan dilakukan melalui penguatan internal Kelompok “Karya Mina Utama” dan Kelompok “Karmina”. Kegiatan bina usaha dilakukan melalui pengembangan mata pencaharian diluar sector pertanian. Sedangkan kegiatan bina lingkungan dilakukan melalui perluasan lahan tambak budidaya ikan lele, pengelolaan dan pemasaran produk olahan dari ikan lele. Pemberdayaan melalui budidaya ikan lele di Desa Tegalrejo secara lebih rinci dilakukan melalui bagan dibawah ini :

¹³ Edi Suharto, “*Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat: Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial*”, (Bandung: PT Refika Aditama, 2005), halaman 63-64.

Tabel 1.1
Indikator Pemberdayaan Berbasis Budidaya Melalui Kampung Lele

Mekanisme Pemberdayaan	Indikator
<p style="text-align: center;">Melalui Pendekatan Partisipatif dengan Pemberdayaan Bina Manusia</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemberian pemahaman dan tujuan budidaya ikan lele, 2. Pengembangan kapasitas dengan pemberian ilmu melalui sosialisasi dan pelatihan kepada masyarakat tentang budidaya ikan lele 3. Terjadinya interaksi yang aktif antar masyarakat dan kelompok
<p style="text-align: center;">Melalui Pendekatan Berkelanjutan dengan Pemberdayaan Bina Kelembagaan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembentukan kelompok budidaya Karya Mina Utama dan kelompok pengolahan Karmina 2. Penguatan serta pengembangan kelompok budidaya Karya Mina Utama dan kelompok pengolahan Karmina
<p style="text-align: center;">Melalui Pendekatan Berkelanjutan dengan Pemberdayaan Bina Lingkungan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Manajemen pengendalian sumberdaya melalui kegiatan

	<p>pengelolaan dan pengawasan terhadap kolam yang digunakan sebagai media budidaya ikan lele</p> <p>2. Pembangunan dan pengembangan infrastruktur fisik di Kampung Lele Desa Tegalrejo</p>
<p>Melalui Pendekatan Kesejahteraan dengan Pemberdayaan Bina Usaha</p>	<p>1. Perumbuhan ekonomi masyarakat meningkat di Kampung Lele Desa Tegalrejo</p> <p>2. Berkembangnya mata pencaharian masyarakat di Kampung Lele Desa Tegalrejo</p>

Sumber : Diolah dari Portofolio Gempita Pokdakan Karya Mina Utama

1.7 Metode Penelitian

1.7.1 Desain Penelitian

Setiap penelitian ilmiah memerlukan metode penelitian. Menetapkan metode penelitian berfungsi untuk menganalisis atau menguji ada tidaknya hubungan antara variabel sebagaimana dikemukakan dalam permasalahan penelitian¹⁴. Desain penelitian kualitatif dipilih dalam penelitian ini, karena metode kualitatif menghasilkan data deskriptif mengenai kata-kata lisan maupun tertulis dan tingkah laku yang dapat diamati dari orang-orang yang diteliti. Hal ini

¹⁴ Suyanto, Bagong dan Utinah (ed), “*Metode Penelitian Sosial: Berbagai Alternatif Pendekatan*”, (Jakarta: Kencana, 2004).

dikarenakan peneliti ingin mengetahui secara lebih mendalam mengenai pemberdayaan masyarakat berbasis budidaya di Kampung Lele Desa Tegalrejo Kecamatan Sawit Kabupaten Boyolali. Tipe Kualitatif adalah tipe penelitian yang bertujuan untuk menganalisis fenomena atau kasus yang berkaitan dengan fokus penelitian yang akan dilakukan secara lebih mendalam.

1.7.2 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian menurut Iskandar adalah situasi dan kondisi lingkungan tempat yang berkaitan dengan masalah penelitian¹⁵. Moleong menyatakan bahwa dalam penentuan lokasi penelitian cara terbaik yang ditempuh dengan jalan mempertimbangkan teori substansif dan menjajaki lapangan untuk mencari kesesuaian dengan kenyataan yang ada di lapangan, sementara itu keterbatasan geografis dan praktis seperti waktu, biaya dan tenaga perlu juga dijadikan pertimbangan dalam penentuan lokasi penelitian¹⁶. Lokasi penelitian yakni Kampung Lele Desa Tegalrejo Kecamatan Sawit Kabupaten Boyolali.

1.7.3 Jenis Data

Jenis penelitian yang digunakan merupakan penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif dengan memberikan gambaran masalah secara sistematis, cermat, rinci dan mendalam. Penelitian kualitatif merupakan data yang dapat mencakup hampir semua data non-numerik. Data ini dapat menggunakan kata-kata

¹⁵ Iskandar, "*Metodologi Penelitian Pendidikan dan Sosial (Kuantitatif dan Kualitatif)*", (Jakarta: GP Press, 2008).

¹⁶ Moleong, Lexy J, "*Metodologi Penelitian Kualitatif*", (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2008).

untuk menggambarkan fakta dan fenomena yang diamati. Penelitian ini terbatas pada usaha mengungkapkan fakta suatu masalah atau peristiwa. Hasil penelitian ditekankan pada memberikan gambaran secara objektif tentang keadaan sebenarnya dari objek yang diselidiki yaitu proses pemberdayaan di Kampung Lele Desa Tegalrejo Kecamatan Sawit Kabupaten Boyolali.

1.7.4 Sumber Data

Penelitian ini menggunakan dua sumber data yaitu :

1. Data Primer

Data primer merupakan data utama yang diambil oleh peneliti secara langsung melalui wawancara yang dilakukan dengan pihak-pihak terkait. Dalam penelitian ini data primer diperoleh langsung dari informan. Data primer yang digunakan adalah hasil wawancara dengan beberapa narasumber.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data-data yang diperoleh secara tidak langsung yaitu dengan memanfaatkan data-data yang telah ada sebelumnya. Data sekunder dapat berbentuk laporan, buku-buku, media cetak, jurnal maupun data yang didapat melalui internet.

1.7.5 Subjek Penelitian

Dalam penelitian ini Penulis akan menggunakan model pengambilan sampel secara bertujuan (*Purposive sampling*). *Purposive sampling* merupakan

sampel yang dipilih cermat dianggap layak atau representatif dalam memberikan informasi mengenai permasalahan penelitian¹⁷. Informan yang dipilih dalam penelitian pemberdayaan masyarakat berbasis partisipasi di Kampung Lele Desa Tegalrejo Kabupaten Boyolali adalah :

1. Dinas Pemberdayaan dan Masyarakat Desa Kabupaten Boyolali
2. Ketua Kelompok Karya Mina Utama
3. Ketua Kelompok Karmina
4. Pelaku usaha

1.7.6 Teknik Pengumpulan Data

Instrument pengumpulan data merupakan alat yang digunakan untuk mengumpulkan data. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan tiga macam teknik utama, yaitu :

1. Wawancara

Wawancara merupakan pertemuan dua orang atau bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Jenis-jenis teknik wawancara adalah sebagai berikut¹⁸ :

- a. Wawancara Terpimpin (terstruktur). Tanya jawab terarah dan terfokus untuk mengumpulkan data-data yang relevan saja. Biasanya menggunakan pedoman wawancara yang memuat hal-

¹⁷ Nasution S, "*Metode Penelitian*", (Jakarta: Bumi Aksara, 2009).

¹⁸ Susanto, "*Metode penelitian social*", (Surakarta: UNS Pres, 2006).

hal yang akan ditanyakan secara terinci, sehubungan dengan pengumpulan informasi tentang topik penelitiannya.

- b. Wawancara Tak Terpimpin (tidak terstruktur). Wawancara tidak terarah. Peneliti hanya menentukan topik dan tujuan yang ingin dicapai dari diadakannya wawancara. Kelemahannya adalah tidak efisien waktu, biaya dan tenaga. Keuntungannya cocok untuk penelitian pendahuluan, tidak memerlukan keterampilan bertanya dan dapat memelihara kewajaran suasana.

Jenis wawancara yang digunakan merupakan wawancara semi terstruktur dimana peneliti mengajukan pertanyaan-pertanyaan secara bebas dan leluasa, tanpa terikat oleh suatu susunan pertanyaan yang telah dipersiapkan sebelumnya. Pertanyaan yang diajukan sesuai daftar yang fleksibel atau sebuah pedoman. Dengan wawancara akan mengetahui hal-hal yang lebih mendalam tentang partisipan dalam menginterpretasikan situasi dan fenomena yang terjadi. Wawancara penting dilakukan karena akan menyediakan hasil pengetahuan yang mendalam dari objek-objek penelitian yang diteliti.

2. Observasi

Pengamatan (observasi) menurut Sutrisno Hadi dalam Andi Prastowo merupakan pengamatan dan pencatatan secara sistematis

terhadap suatu gejala yang tampak pada objek penelitian¹⁹. Observasi dalam hal ini dilakukan untuk mengetahui aktivitas, keadaan dan pelaksanaan proses pemberdayaan masyarakat di Kampung Lele Desa Tegalrejo Kecamatan Sawit Kabupaten Boyolali.

3. Dokumentasi

Menurut Sugiyono dokumentasi adalah catatan peristiwa yang sudah berlalu²⁰. Sedangkan menurut Guba dan Lincoln dalam Moloeng dokumentasi adalah setiap bahan tertulis ataupun film, dokumentasi sudah lama digunakan dalam penelitian sebagai sumber data dimanfaatkan untuk menguji, menafsirkan bahkan meramalkan.

1.7.7 Analisis Data

Analisi data menurut Pantton adalah proses mengatur urutan data, mengoperasikannya dalam suatu pola, kategori dan satuan uraian dasar²¹. Dalam tahap analisi data, data yang diperoleh dari hasil wawancara dan observasi akan dikelompokkan sesuai pola dan kategori-kategori tertentu sesuai dengan pokok-pokok permasalahan yang ada dalam perumusan masalah. Kemudian dianalisis untuk menemukan jawaban dan kesimpulan dari penelitian tersebut. Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data,

¹⁹ Prastowo, Andi, "Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian", (Yogyakarta: Ar-ruzz Media, 2012).

²⁰ Sugiyono, "Metode Penelitian Pendidikan", (Bandung: Alfabeta, 2013).

²¹ M.Q. Patton, "Qualitative Evaluation Method", (Beverly Hills, CA: Sage Publication, 1980).

mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi sesuatu yang dapat dikelola, mensistenskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang diceritakan kepada orang lain²².

Analisis data ini terdiri dari :

1. Reduksi Data

Reduksi data yaitu suatu proses pemilihan, pemusatan perhatian kepada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data yang telah diperoleh. Data yang berasal dari hasil wawancara dan observasi akan dibuat rangkuman dimana jawaban dari sumber atau objek yang diwawancarai tetap utuh sehingga adanya keobjektifan. Data-data yang telah direduksi ini memberikan gambaran yang tajam mengenai hasil dari pengamatan dan mempermudah peneliti jika itu diperlukan. Dalam mengolah hasil sementara menjadi teori substansif, penafsiran data merupakan tahap akhir serta mengambil kesimpulan dari data-data yang sudah dikumpulkan, dianalisis untuk mendapatkan makna dari pokok kajian.

2. Penyajian Data

Kumpulan informasi yang tersusun memberikan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian hasil analisis data pada penelitian ini adalah deskripsi. Deskripsi adalah menyajikan hasil analisis data dengan cara menjelaskan dan menguraikan atau

²² Moleong, Lexy J, "*Metodologi Penelitian Kualitatif*". (Bandung: PT. Remaja Rosadakarya, 2008).

mendeskripsikan objek penelitian. Penyajian data ini dirancang guna menggabungkan informasi yang tersusun dalam bentuk tertentu.

Teknik analisis data yang digunakan adalah :

a. Koding

Pemberian kode secara konsisten untuk fenomena yang sama pada saat menganalisis wawancara atau catatan lapangan. Koding ini memudahkan peneliti dalam beberapa hal identifikasi fenomena, frekuensi kode menunjukkan kecenderungan temuan dan membantu penyusunan kategori. Menurut Mc Millan dan Schumacher, seseorang peneliti ketika melakukan pengkodean menggunakan salah satu system pengklasifikasian sebagai berikut²³ :

1. Membagi-bagikan data pada muatan unit-unit yang disebut topik dan mengelompokkan topik-topik ke dalam kumpulan data yang lebih besar untuk membentuk kategori; atau
2. Memulai dengan kategori-kategori yang ditentukan sebelumnya lalu memecah kategori menjadi subkategori yang lebih kecil; atau
3. Mengkombinasikan strategi-strategi dengan menggunakan beberapa kategori yang ditentukan sebelumnya dan menambah kategori-kategori yang baru ditemukan.

b. Kategorisasi

²³ Mc Millan J.H dan Schumacher S, *Research in Education*, (New York: Longman Inc, 2001).

Kategorisasi berarti menyusun kategori. Kategori tidak lain adalah salah satu tumpukan yang disusun atas dasar pikiran, intuisi, pendapat atau kriteria tertentu.

c. Penafsiran Data

Tujuan yang akan dicapai dalam penafsiran data adalah satu diantaranya beberapa tujuan yaitu teori substantive. Penafsiran data dalam penelitian ini memiliki tujuan akhir yaitu untuk mempermudah teori substantive yang mungkin diperoleh dari pengumpulan data di lapangan. Dalam mengelola hasil sementara menjadi teori substantive, penafsiran data merupakan tahap akhir untuk mendapatkan makna dari pokok kajian.

d. Penarikan Kesimpulan

Dalam awal pengumpulan data peneliti sudah mulai mengerti hal yang diteliti, sehingga memudahkan dalam pengambilan kesimpulan yang longgar tetap terbuka tetapi kemudian menjadi rinci dan mengakar. Jadi berdasarkan data-data yang diperoleh peneliti mencoba mengambil kesimpulan. Penarikan kesimpulan ini tergantung pada besarnya kumpulan data tersebut.